

BAB III

DARI AKSI SOSIAL KE GERAKAN MASSA 212

A. Antusias 212 Sebelum Menjadi Gerakan Massa

Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok adalah salah satu *trigger* tentang terjadinya peristiwa 212 dan ini adalah murni kasus kriminal karena apa yang dilakukan bersangkutan sudah terbukti juga di pengadilan bahwa itu perbuatan yang melanggar hukum bertentangan dengan undang-undang tentang penistaan agama dan inkrah ponisnya jelas bahwa yang bersangkutan bersalah diakui atau tidak gerakan 212 memang termotivasi dari semangat umat Islam untuk bersatu setelah menghadapi berbagai kepastian dari sisi hukum yang dirasakan saat itu bahwa hukum tidak lagi berpihak kepada kebenaran tetapi hukum sudah berpihak pada kekuasaan padahal dalam asas hukum itu sendiri ada suatu asas *equality before the law* yang artinya (semua sama di mata hukum).¹

Tetapi terkadang ketika sudah berhadapan dengan kekuatan-kekuatan tertentu hukum itu seolah-olah tumpul dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga umat tidak puas dengan hasil tersebut laporan yang tidak disikapi sikap yang acuh tak acuh dari oknum-oknum aparat pihak hukum memancing reaksi keras dari umat karena merasa satu hal yang sangat sensitif dari kehidupan mereka yaitu kitab sucinya atau Al-Quran dinistakan oleh Ahok sehingga kejadian 212 ini tidak bisa dipandang sebagai salah satu

¹ Habib Mahdi Muhammad Syahab, Selaku Ketua FPI (Front Pembela Islam) Palembang Sumsel. Wawancara pada tanggal 24 Juni 2019. Pukul 09.00 WIB.

Gerakan forum ormas tertentu atau kekuatan tertentu ini adalah gerakan mayoritas umat yang betul-betul menginginkan keadilan saat keadilan sudah tidak bisa diwujudkan maka jangan salahkan jika terjadi hal-hal semisal gerakan 212. Dan untuk antusias dan keterlibatan gerakan 212 seluruh masyarakat yang hadir dikegiatan 212 orang yang termasuk terlibat dalam setiap sisi mulai dari persiapannya kalau secara pribadi tentu Habib Mahdi Muhammad Syahab selaku Ketua FPI (Front Pembela Islam) Sumatera Selatan Palembang. Memberikan motivasi untuk masyarakat agar dapat hadir disana ikut serta tertib damai dan saat keberangkatan juga seluruh rombongan dari Palembang sebelumnya diperiksa dulu, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh membawa barang yang dianggap berbahaya dalam kegiatan ini supaya memastikan acara 212 ini berlangsung dengan damai acara yang luar biasa yang dilakukan dan penjagaan semaksimal mungkin agar menjaga acara gerakan 212 tetap aman.

Fenomena lain adalah menjamurnya tradisi berbagi dan peduli terhadap sesama dalam aksi 212 elemen integrasi dan pemenuhan kebutuhan sangat terlihat banyak dijumpai perilaku mulia dari kaum muslimin saat itu. Tradisi berbagai antara peserta aksi dilakukan baik masyarakat level menengah maupun masyarakat kelas atas ada yang membagikan makanan, minuman, sajadah, jas hujan, obat-obatan, hingga tersedianya layanan pijat refleksi yang kesemuanya diberikan gratis untuk peserta aksi dapat terlihat jelas dengan menggunakan pakaian serba putih yang merupakan simbol kesatuan dan kebaikan menjadi pemandangan yang menyejukkan dalam aksi tersebut hingga berakhirnya acara tidak terdapat kericuhan atau insiden yang membahayakan.

Melainkan yang ada hanyalah terdokumentasikannya berbagai tradisi kebaikan yang terjadi selama aksi berlangsung peserta aksi seolah-olah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas dengan pesan persaudaraan dan persatuan fenomena ini nampaknya membatah opini buruk yang sebelumnya berkembang di media bahwa 212 dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan.

Terbukti dengan turut hadirnya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, serta Kepala Polri Jendral Tito Karnavian pada aksi 212. Bersama peserta aksi Presiden Jokowi melakukan shalat Jum'at dan doa bersama. Momen tersebut banyak diberitakan oleh media apa yang terjadi pada saat momen 212 begitu membekas dan menjadi kenangan bagi umat Islam khususnya lebih lanjut aksi tersebut telah menyadarkan umat Islam bahwa jika digerakan dengan landasan iman dan bersatu padu tidak bercerai-berai bisa menjadi kekuatan yang sangat besar.

1. Yang Menyebabkan Gerakan 212 Merubah Bentuk Dari Aksi Menjadi Gerakan Massa 212?

aksi bela Islam berjilid yang terjadi tahun 2016 merupakan unjuk rasa yang dipicu dari tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tanggal 27 September 2016, saat melakukan kunjungan kerja sosialisasi budidaya Ikan Kerapu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Berikut lebih jelasnya kutipan pidato Ahok pada saat itu.

“Bapak ibu tidak usah khawatir ini pemilihan kan dimajukan. Kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Kalau program

ini kita jalankan dengan baik bapak ibu tetap bisa panen dengan saya saya cerita ini biar bapak ibu bisa semangat jadi nggak usah pikirin kalau tidak ke pilih pasti Ahok program nya bubar. Nggak saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. Yak kan, dibohongin pake surah Al-Maidah ayat 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin itu ya. Gak papa karena ini kan panggilan pribadi bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak dalam nuraninya gak bisa memilih Ahok gak suka sama Ahok tapi programnya gua kalo nerima gua merasa hutang budi nih jangan. Kalo bapak ibu merasa nggak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke. Jadi ini semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI kebetulan saya Gubernur mempunyai program ini jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa. Ya saya kira itu kalau yang benci sama saya jangan emosi terus dicolok waktu pemilihan colok foto saya wah jadi kepilih nanti saya. Jadi kalau benci sama saya coloknya musti berkali-kali baru batal. Kalau cuman sekali, wah kepilih lho gue entar.²

Pada reaksi diatas, Ahok mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dimana ayat tersebut berisi seruan bagi umat Islam agar tidak menjadikan Non Muslim sebagai ‘Auliya’. Berikut surat Al Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzhalim.

Pada 6 Oktober 2016. Buni Yani yang merupakan dosen Universitas Swasta di Jakarta, mengunggah video berdurasi 30 menit di jejaringan sosial *Facebook* pribadinya. Video tersebut menayangkan penggalan pidato Ahok di Kepulauan Pramuka dengan diberi judul “Penistaan Terhadap Agama”.

² Herianto. Diakses: <https://news.detik.com/berita/d-3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-al-maidah-51-yang-jadi-polemik>. Pada tanggal 24 Agustus 2018. Pukul 10.00WIB.

Video yang telah diunggah kemudian viral hingga menimbulkan berbagai opini di media massa dan sosial media. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mengklarifikasikan bahwa yang telah diunggah oleh Buni Yani dengan *facebook* pribadinya adalah potongan video yang aslinya berdurasi 1 jam 40 menit. Disisi lain pada 6 Oktober 2016 Ahok juga mengklarifikasi melalui akun sosialnya:

Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah-olah saya melecehkan ayat suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu. Berkenaan dengan itu saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Quran tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci baik itu Al-Quran, Alkitab, maupun kitab lainnya.

Meskipun dalam redaksi di atas Ahok telah mengklarifikasi potongan videonya yang telah beredar di *social media* sebagai umat muslim tetap melihat bahwa dalam potongan video tersebut memang terdapat ucapan Ahok yang dinilai telah menistakan Al-Quran dan ulama. Hal tersebut membuat ramai pemberitaan di media tercatat adanya 14 laporan dari masyarakat ataupun ormas-ormas kepada pihak kepolisian mulai tanggal 7 hingga 12 Oktober 2016. Awalnya Ahok dilaporkan oleh MUI Sumatera Selatan atas tuduhan penistaan agama kemudian di Jakarta, sekretaris Jendral DPP FPI Novel Chaidir Hasan, juga melaporkan Ahok atas tuduhan menghina agama ke Bareskrim Polri. Laporan-Laporan tersebut berdasarkan Pasala 156a KUHP pasal 28 ayat (2) UU No11 tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Atas desakan dan laporan masyarakat baik lisan maupun tulisan membuat

Majelis Ulama Indonesia pusat bergerak cepat. MUI kemudian membentuk tim yang beranggotakan komisi fatwa. Komisi pengkajian komisi perundangan dan komisi informasi komunikasi. Keempat, komisi tersebut melakukan pengkajian dari investigasi yang dilakukan mulai dari tanggal 1 hingga 11 Oktober 2016. Hasil dari kajian yang melibatkan empat komisi tersebut berupa pernyataan yang menistakan Al-Qur'an dan Ulama.

Kami sudah lakukan penelitian dan investigasi dan menyimpulkan bahwa ucapannya (Ahok) itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama.

Sebagaimana pernyataan diatas dalam persidangan Ahok yang dilakukan pada 31 Januari 2017. Ma'ruf Amin selaku ketua MUI pusat menjadi salah satu saksi di persidangan menjalankan bahwa hasil keputusan dari empat komisi MUI ketika itu bukan hanya sekedar fatwa melainkan pendapat keagamaan. Pendapat atau sikap keagamaan dinilai lebih tinggi dari fatwa karena telah melibatkan empat komisi dan juga pengurus harian. Pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI ketika itu bukan berdasarkan dari bahasa mengenai isi kandungan atau tafsir surat Al-Maidah ayat 51. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tafsiran dari surat Al-Maidah sendiri menjadi polemik pada saat itu. Fokus MUI adalah kepada kalimat yang diucapkan Ahok. Kalimat mengenai penggunaan surat Al-Maidah sebagai alat untuk berbohong. Sikap keagamaan yang telah dikeluarkan MUI kemudian menjadi perhatian public luas baik di level nasional bahkan internasional.

Respon dari masyarakat pun beragama ada yang mendukung ada yang menolak atau bersikap netral dalam menanggapi pernyataan sikap tersebut. Sempat terdapat asumsi terkait sikap MUI pusat dianggap mendadak tiba-tiba dan tergesa-gesa dalam menetapkan keputusan. Disisi lain adanya sikap keagamaan tersebut membuat gelombang massa menuntut agar Ahok dipriksa dan di hukum semakin membesar. Kendati demikian tuntutan masyarakat saat itu tidak mendapatkan respon yang cepat dan terkesan tidak sungguh-sungguh dalam memproses kasus tersebut. Atas dasar tersebut tercetuslah aksi massa yang menuntut penindakan hukum atas Ahok. Aksi massa pertama kali dilakukan pada juma'at 14 Oktober 2016 dengan diikuti sekitar ratusan ribu massa.

Peserta melakukan aksinya di depan Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Aksi ini diinisiasi oleh GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta) dan FPI (Front Pembela Islam) dibawah komando Rizieq Shihab. Serentak bersamaan dengan aksi di Jakarta.³ di Jawa mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur tak luput dari gelombang menuntut keadilan. di Sumatera dari Aceh, Padang, hingga Palembang turut angkat suara. Ribuan masyarakat Sumatera Selatan misalnya melakukan *longmarch* dari Masjid Agung Palembang menuju Kantor DPRD sejauh lima kilometer mereka mengular memenuhi jalan-jalan.

Aksi 4 November merupakan aksi bela Islam kedua yang dikenal dengan aksi damai 411. Peserta yang hadir pada saat itu berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan jumlahnya lebih banyak dari peserta aksi bela islam yang

³ Siti Utami Prismamudti. "Strategi Komunikasi GNPf-MUI Dalam Menggalang Massa Aksi 212, *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

pertama. Selain dari ormas-ormas Islam, aksi tersebut juga dihadiri oleh anggota Parlemen seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Serta turut hadir organisasi mahasiswa muslim seperti KAMMI (Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tuntutan pada aksi 411 tetap konsisten dengan aksi sebelumnya yakni menegakan hukum yang berkeadilan.

Politik pewacanaan yang demikian sangat cepat sekali berubah khususnya pasca aksi bela Islam II pada 4 November yang juga menimbulkan ketegangan politik antara elit politik di Indonesia juga ikut mempengaruhi bagaimana pewacanaan mengenai aksi bela Islam direproduksi melalui format pewacanaan baru dimana wacana yang disusun dan disebarluaskan kepada public bukan hanya tentang membela Islam semata-mata tetapi bahwa kepentingan membela Islam itu ditunjukkan bagi persatuan dan kesatuan nasional dimana umat muslim sebagai mayoritas pendukung di Indonesia masih menginginkan bentuk NKRI sebagai Negara Kesatuan dan bahwasanya aksi-aksi bela Islam selama ini sama sekali tidak melanggar ketentuan konstitusi dan bahkan dianggap (diklaim) sebagai manifestasi aspirasi suara umat Islam di Indonesia yang sesungguhnya.

Oleh karena itu dalam mobilisasi massa aksi bela Islam III dukungan yang diberikan pada aksi ini mengalami perluasan simpati bahkan dari beberapa komunitas majelis ta'lim dan para santri dari beberapa daerah di luar Jakarta. Perluasan simpati ini ditengarai muncul khususnya ketika media massa banyak memberitakan reaksi yang dimunculkan oleh pemerintah JokoWidodo (Jokowi) pasca aksi bela Islam II di bulan November 2016 melalui serangkaian tuduhan

makar terhadap beberapa tokoh politik oposisi yang ditengarai ikut terlibat memfasilitasi dan memberi dukungan dalam aksi tersebut. Kalangan inisiator aksi bela Islam khususnya FPI dan juga GNPF-MUI mentafsirkan reaksi pemerintah Jokowi itu sebagai suatu bentuk kedzaliman oleh penguasa terhadap umat Islam. Inilah yang kemudian mendorong gelombang simpati public khususnya kaum muslim yang sebelumnya bahkan sama sekali tidak pernah menunjukkan simpati

Pada wacana-wacana yang dikemukakan oleh FPI (Front Pembela Islam) sebagai ormas Islam yang pertama-tama mewacanakan aksi bela Islam I atau aksi yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan memunculkan polemic penistaan agama oleh Ahok yang hanya didukung oleh sedikit massa FPI dan simpatisannya. Aksi itu menjadi meluas khususnya sejak aksi bela Islam II didukung dari beberapa aktivis organisasi mahasiswa Islam seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia) dukungan bagi aksi bela Islam semakin membesar semenjak keluarnya fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok pada 4 November 2017.⁴

Dampak lain selain munculnya dukungan dan simpati yang sangat besar dari banyaknya kaum muslim pada aksi Islam III atau aksi 212 adalah bagaimana ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain non keagamaan menggunakan wacana NKRI di dalam mewacanakan aksi bela Islam dan membuat pemerintah pada akhirnya ikut memfasilitasi aksi yang ditunjukkan melalui shalat jumat di lapangan Monas pada tanggal 2 Desember 2016. Yang bahkan akhirnya juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

⁴ Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani, *Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring*, Jurnal Pemikiran Sosiologi. volume 4 No.2. Diakses pada 02 September 2018.

Jadi dapat dikatakan bahwa aksi bela Islam III merupakan momentum puncak mobokrasi yang didesain secara sukses oleh inisiator dan ormas-ormas penggerak aksi itu maupun para elit politik yang sejak awal sudah menunjukkan dukungan terhadap aksi ini misalnya seperti yang ditunjukkan melalui keterlibatan beberapa ormas non-islam seperti contohnya JMP (jaringan Merah-Putih) yang pernah terlibat dalam mobilisasi massa bagi pendukung salah satu capres dari partai Gerindra pada pemilu 2014. Dukungan elit-elit politik khusus mereka yang menjadi oposisi pemerintah saat ini (Jokowi) dalam aksi bela Islam meskipun tidak dimunculkan dalam kehadiran mereka di dalam aksi tetapi nampak di dalam pernyataan-pernyataan yang mereka munculkan di media massa.

Teori *framing* yang digunakan pada skripsi ini adalah model teori pembingkaiian yang dibuat oleh Robert M. Entman yang menyatakan bahwa teori pembingkaiian atau pembingkaiian berita merupakan teori yang menonjolkan informasi-informasi tertentu dalam suatu bahasa. Tujuan dari dilakukannya pembingkaiian ini adalah agar informasi-informasi tersebut dapat menjadi lebih menonjol, lebih bermakna, dan lebih mudah diingat oleh khalayak Entman menyatakan cara untuk menonjolkan informasi tersebut adalah dengan cara pengulangan (*repetition*) atau mengasosiasikan informasi tersebut dengan simbol yang familier secara kultural.

Framing atau pembingkaiian berita ini akan mendorong orang untuk focus kepada bagian-bagian tertentu dari keseluruhan peristiwa atau fenomena pembingkaiian merupakan suatu cara untuk menyampaikan berita atau informasi melalui perspektif tertentu oleh karena itu pembingkaiian dapat mempengaruhi

cara seseorang dalam memahami suatu kejadian dan tindakan yang akan seseorang ambil atas kejadian tersebut.

Setiap media pasti akan memilih sudut pandang dan posisi tertentu dalam suatu isu politik latar belakang hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kepentingan dari media tersebut maupun oleh modal dan kepemilikan media lalu bagaimana *frame* atau bingkai suatu berita dibentuk? Entman menyatakan terdapat alur atau tahapan-tahapan dalam proses pembingkaiannya yaitu *define problems* (identifikasi masalah), *diagnose causes* (mendiagnosa atau menentukan masalah), *diagnose causes* (mendiagnosa atau menentukan masalah), *make moral judgement* (mengevaluasi penyebab dan dampaknya), dan yang terakhir adalah *suggest remedies* (menentukan cara penyelesaian termasuk mempredikasikan dampak dari penyelesaian tersebut).⁵

Indikator pertama yaitu *define problems* atau mendefinisikan (mengidentifikasi) merupakan sudut pandang apa yang ditetapkan oleh media dan posisi media dalam isu tertentu. Disini posisi media dalam suatu isu dapat bersifat pro, kontra, maupun netral. Setiap media akan mengambil posisi yang berbeda dan karenanya *framing* atau pembingkaiannya didalam sebuah berita dapat teridentifikasi. Indikator kedua yaitu *diagnose causes* adalah tahapan dimana wartawan mendiagnosa penyebab masalah dan menghadirkannya dalam paragraf penjelasan inti berita indikator selanjutnya adalah *make moral judgement* atau menyusun penilaian moral dari peristiwa yang diberitakan.

⁵ Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta : Lkis Group, 2011). h. 223.

Setelah masalah teridentifikasi dan penyebabnya diketahui maka yang selanjutnya dilakukan adalah membuat penilaian moral. Maksud dari membuat penilaian moral ini adalah penambahan substansi yang dapat memperkuat ide-ide yang telah diutarakan. Indikator yang terakhir adalah *suggest remedies* atau memberikan saran perbaikan terhadap masalah yang diberitakan dalam tahap ini masalah didalam suatu isu diberi saran atau alternatif penyelesaian sesuai dengan keinginan jurnalis atau wartawan dalam media yang bersangkutan penyelesaian yang diberikan akan tergantung pada sudut pandang masalah yang diambil karena hal tersebut akan mempengaruhi apa dan siapa yang menyebabkan masalah tersebut.⁶

Analisis teori *framing* yang menyebabkan perubahan.

Gambar table 01.

Keterlibatan	Ahok mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dimana ayat tersebut berisi seruan bagi umat Islam agar tidak menjadikan non muslim sebagai auliya atau pemimpin. Sehingga munculah gerakan 212 yang termotifasi dari semangat umat Islam untuk bersatu menghadapi berbagai ketipangan dari sisi hukum yang dirasakan saat itu tidak berpihak kepada kebenaran tetapi sudah berpihak pada kekuasaan padahal dalam asas hukum itu sendiri ada suatu asas semua sama di mata hukum.
Proses berlanjut yang di angkat	Laporan yang tidak disikapi yang acuh

⁶ Abidatu Lintang Pradipta Dkk. *Analisis Bingkai Pemberitaan Aksibela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) di Media Massa Bbc (Indonesia) & Republika*, Jurnal, Informasi Kajian Ilmu Komunikasi, Volume 48 No.1. Diakses pada 13 Juni 2019.

menjadi isu yang banyak dan muncul tokoh yang berpengaruh.	tak acuh dari oknum-oknum aparat pihak hukum memancing reaksi keras dari umat karena merasa satu hal sangat sensitif dari kehidupan mereka yaitu kitab sucinya Al-Quran dinistakan.
Percepatan Isu.	Gerakan 212 bukan politik kelas rendah bukan hanya sekedar Ahok atau bukan Ahok atau Gubernur atau bukan Gubernur tetapi ini adalah politik bagaimana ketika berhadapan dengan kekuasaan dengan keadilan yang harus diberikan perlawanan agar tidak terjadi kezoliman dimana-mana. Dengan adanya media sosial jika digunakan dengan benar menjadi alat perjuangan mampu mempersatukan umat dan bisa menjatuhkan kekuasaan.
Keterlibatan Massa.	Gerakan 212 tidak bertentangan dengan hukum undang-undang dan agama dan mempunyai tujuan yang mulia menyatukan suara umat mengajak umat untuk shalat, berzikir dan meminta, mendesak pada penguasa untuk menegakan keadilan. Saat keadilan sudah tidak bisa diwujudkan maka jangan salahkan jika terjadi hal-hal semisalnya 212.

Gambar table 02.

2. Gerakan Massa 212 di Kota Palembang

Aksi bela Islam II yang dikenal sebagai aksi 212 dalam liputan di banyak media (baik media mainstream yang sekuler maupun media-media komunitas di kalangan kaum muslim yang beragam) diapresiasi sebagai aksi damai hal itu dikarenakan aksi tersebut ditunjukkan melalui suatu mobilisasi massa yang demikian besar dalam bentuk ibadah shalat juma'at di lapangan Monas Jakarta pada 2 Desember 2016. Hal yang membedakannya dengan aksi sebelumnya di aksi bela Islam I dan bahkan II pada 4 November yang berakhir dengan unjuk rasa

dan kerusuhan di beberapa lokasi di DKI Jakarta sebelumnya pada tanggal 4 November 2016.

Sejumlah ormas Islam melakukan demonstrasi besar yang berakhir dengan kerusuhan untuk menuntut Ahok atau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah melakukan penghinaan terhadap kaum muslim karena pernyataan di hadapan sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu pada bulan September 2016 dengan mengutip ayat dari Al-Quran yaitu surah Al Maidah ayat 51. Polemik tentang penistaan agama inilah yang menjadi momentum awal bagaimana mobilisasi massa dilakukan oleh GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa–Majelis Ulama Indonesia) sebagai organizer utama aksi bela Islam mengklaim mobilisasi massa itu dibenarkan karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait pernyataan Ahok tersebut sebagai suatu pernyataan yang menistakan Al-Quran dan ulama dan karena disampaikan dimuka umum maka pernyataan tersebut dianggap memiliki konsekuensi hukum.⁷

Sejumlah ormas Islam di Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengikuti aksi bela Islam jilid III menuntut keadilan penjarakan Ahok di Jakarta pada jumat 2 Desember, bagi mereka yang ingin berangkat ke Jakarta diminta tetap berkoordinasi dengan pihaknya sehingga teknis keberangkatan bisa teratur ormas Islam asal Sumsel yang akan ikut aksi damai 212 akan mematuhi aturan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq dan koordinator GNP-MUI Bachtiar

⁷ Arie Setyaningrum pamungkas dan Gita Octaviani. *Aksi bela Islam dan ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunikasi Luring*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 . Diakses pada 28 Mei 2019.

Nasir sebagai massa pendukung dari luar Pulau Jawa pihaknya akan mengikuti aturan yang telah disepakati antara GNPF-MUI dan Polri.

Aksi damai 212 tak memiliki tujuan lain kecuali menuntut agar tersangka penista agama atau sering disebut Ahok dapat dimasukkan ke Sel tahanan dan meminta jaksa agung agar profesional dalam mengawal kasus Ahok dan secepatnya Ahok ditahan. Sekretaris jendral FPI Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab menjelaskan aksi tersebut dilakukan guna menuntut agar tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Saat aksi damai itu kita hanya menggelar sajadah, tausiyah serta membaca doa bersama untuk para ulama. Tidak ada *long march* kita hanya duduk di halaman masjid kita meminta agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama.⁸ Diakui atau tidak gerakan 212 memang termotifasi dari semangat umat Islam khususnya dari Masyarakat Sumatera Selatan Palembang.

Untuk bersatu setelah menghadapi berbagai ketimpangan dari sisi hukum yang dirasakan saat itu bahwa hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran tetapi hukum sudah berpihak pada kekuasaan padahal dalam asas hukum ada asas *equality before the law* (semu sama di mata hukum). Bagi masyarakat Palembang sendiri sebagian sangat mendukung dengan adanya gerakan 212 ini karena tidak bertentangan dengan hukum undang-undang Negara dan juga tidak bertentangan dengan agama selagi setiap kegiatan yang baik bukan hanya 212 kalau itu positif apa lagi dengan tujuan yang mulia menyatukan suara umat mengajak umat untuk berzikir meminta dan mendesak pada penguasa untuk

⁸ Habib Mahdi Muhammad Syahab, Selaku Ketua FPI (Front Pembela Islam) Palembang Sumsel. Wawancara Langsung Pada Tanggal 24 Juni 2019. Pukul 09.00 WIB.

Menegakan keadilan dan tidak ada masalah bagi masyarakat yang mendukung atau tidak di Kota Palembang yang mendukung bagus yang tidak mendukung dengan alasan tertentu juga tidak usah dijadikan folemik dan tidak usah kita komflikkan mereka untuk diadu bahwa ini ada yang dukung atau tidak dalam setiap perjuangan itu biasa ada yang siap membantu ada yang siap terjun ada yang siap berdoa jadi tidak bisa dikatakan yang tidak hadir berarti tidak mendukung adapun orang yang merendahkan melecehkan dan tidak setuju dengan kegiatan tersebut, itu hanya segelintir saja yang tidak bisa menjadi tolak ukur terbukti geraka 212 yang diminati betul-betul menjadi momen persatuan ummat dan Negara ini lah akan menjadi kuatan besar. Didalam menghadapi bahaya besar di Negri ini.

Yang dilakukan Ahok itu melukai perasaan umat Islam saya pribadi sebagai ketua Front Umat Islam (FUI) sangat kecewa karena Al-Quran sebagai pandoman umat muslim dilecehkan tentu menjadi kewajiban kita untuk melakukan pembelaan terkusus di daerah Palembang.⁹

aksi damai 212 pada tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta merupakan puncak dari aksi membela agama dimana jutaan umat Islam secara kesadaran dirinya berkumpul untuk berdoa, bermunajat, wirid, tahlilan, dan mendengarkan tausiyah, kemudian diakhiri dengan sholat jumaat berjamaah. Partisipan yang ikut membela agama ini diikuti oleh ormas-ormas Islam dan Organisasi Mahasiswa Muslim seperti Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

⁹ Umar Syait, Wawancara, Selaku ketua Front Umat Islam (FUI) Sumsel, Palembang, 18 Juni 2019. Pukul 14.00 WIB.

B. Aktor Dan Konteks Gerakan 212

1) Salah satu aktor yang berlandung dalam gerakan GNPF-MUI yang terus menerus menyuarakan keadilan adalah mereka yang lahir di era tahun 1960. Sebut saja Bachtiar Nasir (lahir 1967), M Zaitun Rasmin (lahir 1966), Rizieq Syihab (lahir 1965) dan Munarman (lahir 1968).

2) Konteks Gerakan 212

a. Kelompok-Kelompok Gerakan 212

Aksi damai 212 pada tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta merupakan puncak dari aksi membela agama dimana jutaan umat Islam secara kesadaran dirinya berkumpul untuk berdoa, bermunajat, wirid dan tahlilan, mendengarkan tausiyah kemudian diakhiri dengan sholat jumaat berjamaah. Partisipan yang ikut membela agama mencapai angka kurang Lebih 500.000.¹⁰ yang terdiri dari beberapa kelompok Islam di Palembang Sumatera-Selatan yaitu FPI (Front Pembela Islam), OKB (Organisasi Kerukunan Umat Beragama), FUI (Forum Umat Islam), HMI (Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia), dan lain-lain hari jumat berlangsung secara damai dan lancar bahkan diwarnai dengan fenomena aksi toleransi.

b. Ideologi Gerakan

Eriyanto menempatkan ideologi sebagai konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis.¹¹ Hal ini menurutnya, karena teks, percakapan dan

¹⁰ Umar Said, Selaku Ketua FUI (Front Umat Islam) Palembang Sumsel. Wawancara Pada Tanggal 18 Juni 2019. Pukul 14.00 WIB.

¹¹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2012). h.61.

lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau perceminan dari ideologi tertentu ideologi adalah sitem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi kesadaran.

FPI (Front Pembela Islam) adalah sebuah organisasi massa Indonesia yang dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* di setiap aspek kehidupan.

Adapun latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain:

1. Adanya penderitaan panjang ummat Islam di Indonesia karena lemahnya *control* sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.
2. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalelah di seluruh sector kehidupan.
3. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.

C. Media Sosial dan Gerakan Politik di Kota Palembang

1). Gambaran Intensitas Media Di Massa

Peran media sosial sebagai bagian dari semangat demokrasi. Shirky dan Lim berpendapat bahwa media sosial memiliki kemampuan mendorong mobilisasi massa sekaligus menghalang respons tindakan secara cepat media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram* ikut berperan penting menggulingkan pemerintahan.¹² Salah satunya dalam kasus 212 tentang penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu yang banyak melukai hati para umat Islam.

¹² I Gusti Agung Ayu Kade Galuh, *Media Sosial dan Demokrasi*, (Yogyakarta: PolGov. 2017). h.3.

Akun *facebook* Buni Yani menjadi cikal bakal pemicu terkait video pidato Ahok dalam penyuluhan program pemerintahan di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Video tersebut menjadi viral dan terebar di berbagai *sosial media*. Secara keseluruhan pidato yang disampaikan Ahok berkaitan dengan perencanaan pengembangan potensi sumber daya yang terdapat di Kepulauan Seribu. Akan tetapi dalam pidato Ahok memberikan gambaran mengenai isu yang dibahas dengan menyinggung ayat Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 51.

Dalam potongan video tersebut terdapat kalimat *dibohongi* pakai surah Al-maidah ayat 51 kalimat ini menjadi sorotan berbagai kalangan dan dianggap sebagai sebuah penistaan terhadap agama Islam sehingga timbulah keresahan di masyarakat muslim pada umumnya juga ulama, kiai, habib dan ustadz pada khususnya karena tersinggung atas ucapan Ahok tersebut gejala opini pun terjadi di media *mainstream* dan sosial media.

2). Gambaran 212 di Media Sosial

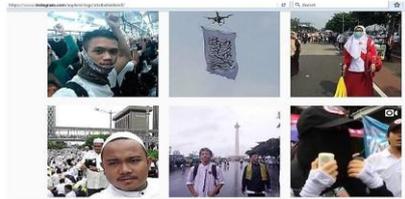
Aksi bela Islam yang terjadi pada 2 Desember 2006 atau lebih dikenal sebagai aksi 212 merupakan kulminasi dari gerakan turun ke jalan yang untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur petahanan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Gerakan massif berpusat di halaman Monumen Nasional (Monas) ini dihadiri oleh umat muslim dari berbagai kalangan baik dari jakarta maupun luar jakarta wakil ketua gerakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Zaitun Rasmin menyebutkan bahwa demo yang diisi dengan orasi dan doa bersama ini dihadiri sekitar tiga juta peserta gerakan aksi 212 yang di dahului

dengan aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 dipicu oleh kemarahan kolektif masyarakat Islam khususnya di Jakarta yang mempermasalahkan penggunaan surah Al-Maidah ayat 51 dalam kampanye Ahok di Kepulauan Seribu.

Ahok dianggap telah menistakan agama Islam karena menyebut bahwa pemilih beragama Islam dalam Pilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dibohongi dengan Al Maidah yang dibuktikan dalam sebuah video. Aksi ini mendapat peliputan berita yang besar dari berbagai media baik dari dalam dan luar negeri. Tidak dipungkiri bahwa pemberitaan Pilgub DKI Jakarta 2017 memang menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia apa lagi unsur-unsur kampanye hitam (*black campaign*) yang menyangkut pasangan calon Gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2016 adalah (1) Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, (2) Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dan (3) Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Pasangan Anies-Sandi yang maju atas tiket PKS dan Gerindra memang mendapat dukungan penuh oleh umat Islam yang mempunyai sentimen negative terhadap pasangan Ahok dan Djarot. Tidak heran ketika Ahok terindakasi menistakan agama Islam masyarakat Islam bereaksi dengan cukup keras sehingga tercetus gerakan aksi bela Islam.

3). Gambar Gerakan 212 di Media Sosial

➤ Instagram



Gambar No.1.

Gambar selfi para pendukung aksi bela islam II

➤ Facebook



Gambar No.2.

➤ Whatsapp



Gambar No.3.

4). Media Sosial dan Penyajian Opini Publik

Internet merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi maka internet dapat memunculkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya. Jika pada masa lalu masyarakat berinteraksi secara *face to face communication*, maka dewasa

ini masyarakat berinteraksi di dalam dunia maya atau melalui interaksi sosial *online*. Melalui kecanggihan teknologi informasi maka masyarakat memiliki alternatif lain untuk berinteraksi sosial.

Munculnya internet dapat menghubungkan antara manusia dari berbagai dunia yang tidak saling kenal sebelumnya dengan cara mengkoneksikan *computer* dengan jaringan internet, interaksi antara manusia tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan jasmani maupun rohani, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi. Setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian dari tuntutan kehidupan dan sebagai penunjang kegiatannya internet sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan informasi.¹³

Adapun cara penyajian opini public yaitu dengan *framing* karena isu tertentu ketika dikemas dengan bingkai tertentu bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang berbeda atas suatu isu. *Framing* atas isu umumnya banyak dipakai dalam literatur gerakan sosial dalam suatu gerakan sosia ada strategi bagaimana supaya khalayak mempunyai pandangan yang sama atas suatu isu. Itu seringkali ditandai dengan menciptakan masalah bersama musuh bersama dan perlawanan bersama.

Hanya dengan itu khlayak bisa digerakan dan mobilisasi semua itu membutuhkan *framing* bagaimana isu dikemas bagaimana peristiwa di pahami dan kejadian didefinisikan dan dimaknai. *Framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total

¹³ Nur Syam, *Media Sosial*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016). h. 1.

melainkan dibelokan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta.

Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih bagaimana aspek tersebut ditulis hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata kalimat gambar atau foto dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak kalau lebih sederhananya lagi penjelasan *framing* ini seperti menggiring opini publik. Media mampu melakukan merubah sudut pandang *public* yang semula (A) bisa menjadi (B) dengan cara apa wartawan atau media menonjolkan pemaknaan atau penafsiran mereka atas suatu peristiwa? wartawan memakai secara strategis kata kalimat, *lead*, hubungan antara kalimat, foto, grafik, dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan.

Frame berhubung dengan makna bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Elemen yang menandakan pemahaman seseorang mempunyai bentuk yang terstruktur dalam bentuk aturan atau konvensi penulisa sehingga ia dapat menjadi jendela melalui makna-makna yang tersirat dari berita menjadi terlihat. Perangkat apa yang menandakan suatu *framing* dari berita? Ia secara struktural dapat diamati dari pemilihan kata atau simbol yang dibentuk melalui aturan atau konvensi

tertentu iya berfungsi sebagai perangkat *framing* karena dapat dikenal dan dialami dapat dikonseptualisasikan kedalam elemen yang kongkret dalam suatu wacana yang dapat disusun dan dimanipulasi oleh pembuat berita, dan dapat dikomunikasikan dalam kesadaran komunikasi.¹⁴

C. Dari Gerakan Massa ke Politik Media

1. Proses perubahan dari gerakan massa ke media.

Gerakan massa merupakan aktivitas yang melibatkan orang banyak berfokus pada hal-hal tertentu. Misalnya gerakan massa dalam gerakan aksi 212 terhadap Ahok gerakan massa dapat memanfaatkan berbagai elemen atau instrument yang ada sebagai triger atau pemicu untuk terjadinya gerakan massa pemicu ini bisa dalam bentuk “propaganda” berbagai bentuk media massa yang dipakai sebagai pemicu gerakan massa diantaranya adalah media sosial, sebagai hasil atau produk dari media. Gerakan 212 merupakan salah satu contoh gerakan massa yang didukung penuh oleh masyarakat Islam media sosial cukup besar untuk menuntut Ahok dipenjarahkan.

Video dan foto Ahok bermunculan di *facebook* melalui peran besar media sosial yang kuat dalam membuat gerakan ini menjadi gerakan massa berita mengenai penistaan agama ini pun ditayangkan dan dimuat dalam pemberitaan di media-media masa konvensional seperti media cetak dan media elektronik yang ini pula membuat masyarakat mengetahui kasus ini tidak terima dengan pernyataan Ahok dikepulauan seribu yang akhirnya memicu kemarahan

¹⁴ Deddy Mulyana, *Analisis Framing*, (Yogyakarta : Lkis Group, 2002). h. 293.

masyarakat hingga timbulah gerakan aksi damai 212 dalam menuntut keadilan agar Ahok dapat dipenjarakan.

2. Taktik atau strategi media Sosial

Setiap bentuk media sosial mampu memobilisasi dukungan jika digunakan secara tepat sesuai karakter dan fungsi utamanya. Aktor gerakan menyadari kekhasan yang dimiliki setiap media sosial dan menggunakannya sebagai strategi perlawanan teks audio visual tanpa batas durasi disebar lewat *youtube*. Video-video yang di unggah diurutkan berdasarkan tema dan tipenya untuk memudahkan pencarian. *Instagram* digunakan untuk menarik minat teman virtual terhadap isu melalui citra foto. Hasil kajian atau opini dengan format karakter panjang disebar lewat *facebook*. Dalam *facebook* dan *instagram*, jaringan pertemanan (*virtual*) yang memang sudah tertarik dan percaya pada si pencipta pesan-lah yang menerima dan menyebarkan kembali pesan pada jaringan virtual lainnya sebagaimana diungkap diatas.

Misi kajian ini memotret proses demokrasi yang tercemrin dalam praktik gerakan sosial yang menggunakan media sosial sebagai bagian dari strategi gerakan internet menjadi media alternative untuk menyampaikan aspirasi kritis sekaligus menemukan informasi dari berbagai sudut pandang selain untuk bertukar informasi internet memberi kesempatan bagi pengguna untuk membangun jaringan virtual.

Proses nalar dan refleksi mengarahkan para aktor untuk memilih media sosial sebagai strategi gerakannya serta menjadi dasar pembentukan identitas kolekti mereka identitas ini kemudian ditunjukkan disebar dan kembali dikuatkan melau konten kemarahan di media sosial.¹⁵ Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa proses nalar, refleksi, pembentukan identitas kolektif serta produksi sekaligus penyebaran konten kemarahan oleh aktor menjadi suatu siklus yang saling mengunci. Ada rasa kemarahan bersama yang semakin menguat kemudian mendorong mereka untuk saling bertemu dalam kasus 212 proses penguatan identitas kolektif ini memasuki fase interaksi tatap muka baik secara internal (di dalam organisasi Islam) maupun eksternal (masyarakat setempat dan publik luas).

¹⁵ I Gusti Agung Ayu Kade Galuh. *Media Sosial dan Demokrasi*. (Yogyakarta : PolGov, 2017). h.152.